

## UPAYA PERDAMAIAN DI SEMENANJUNG KOREA

7

Sita Hidriyah

### Abstrak

*Presiden Korea Selatan Moon Jae-In dan Pemimpin Korea Utara Kim Jong Un kembali mengadakan pertemuan di Pyongyang pada bulan September 2018. Pertemuan menghasilkan Deklarasi Pyongyang yang memuat sejumlah kesepakatan dalam kerangka proses perdamaian di Semenanjung Korea. Memperhatikan hasil pertemuan Pyongyang, masyarakat internasional berharap bahwa kesepakatan yang dicapai tersebut dapat diimplementasikan, sehingga mengurangi keraguan akan terwujudnya perdamaian di Semenanjung Korea. Dalam isu denuklirisasi misalnya, Korea Utara harus memperlihatkan bahwa hal tersebut akan dilaksanakan secara sungguh-sungguh dan dalam kerangka menuju kesepakatan perdamaian secara permanen dengan Korea Selatan. Perkembangan situasi di Semenanjung Korea yang semakin kondusif telah memperkuat ruang dialog dan kerja sama antar-kedua Korea untuk mewujudkan perdamaian di Semenanjung Korea. Negara-negara di kawasan, termasuk Indonesia, harus turut mengawal upaya perdamaian ini. Upaya perdamaian di Semenanjung Korea tersebut menjadi fokus kajian singkat ini.*

### Pendahuluan

Isu seputar perdamaian di Semenanjung Korea kembali menjadi pemberitaan di media massa dalam waktu dua minggu terakhir ini, terutama setelah Presiden Korea Selatan Moon Jae-in melakukan kunjungan ke Pyongyang pada tanggal 18 sampai dengan 20 September 2018. Ini adalah kunjungan pertama Moon Jae-in ke ibukota Korea Utara, Pyongyang, meskipun ia telah bertemu Kim Jong-Un dua kali di desa perbatasan Panmunjom. Kunjungan Presiden Moon ke

Pyongyang, selain untuk memenuhi undangan Pemimpin Korea Utara Kim Jong-Un, juga dimaksudkan untuk membicarakan kelanjutan pembicaraan damai antar-kedua Korea, dan mendorong kembali proses perundingan perlucutan nuklir antara Korea Utara dan Amerika Serikat (AS), yang juga menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari upaya mewujudkan perdamaian di Semenanjung Korea.

Pembicaraan damai antar-kedua Korea yang terkesan lambat, dan belum adanya perundingan lanjutan antara Korea Utara



dan AS menyangkut perlucutan nuklir, menimbulkan keraguan masyarakat internasional akan upaya perdamaian di Semenanjung Korea. Belum lagi badan pengawas atom PBB (*International Atomic Energy Agency/IAEA*) pernah menyebutkan dalam salah satu laporannya bahwa Korea Utara masih terus mengembangkan program senjata nuklirnya (*theguardian.com*, 19 September 2018). Tulisan ini akan membahas secara singkat bagaimana upaya perdamaian di Semenanjung Korea pasca-pertemuan Pyongyang, dan dengan memperhatikan situasi yang berkembang di kawasan ini.

### Hasil Pertemuan Pyongyang

Kunjungan Presiden Moon Jae-in ke Korea Utara pada tanggal 18-20 September 2018, dan pertemuannya dengan Pemimpin Korea Utara Kim Jong-Un di Pyongyang, diberitakan oleh berbagai media telah menjadi bagian penting dari upaya kedua Korea untuk kembali memperkuat dialog dalam kerangka terwujudnya perdamaian di Semenanjung Korea. Pada pertemuan tersebut Kim Jong-Un memang tampak lebih terbuka dalam membangun dialog dengan Presiden Moon dari Korea Selatan, dan sebagai hasilnya kedua Korea sepakat menandatangani “Deklarasi Pyongyang September 2018” (*“Pyongyang Joint Declaration of September 2018”*) dan kesepakatan militer komprehensif (*The Jakarta Post*, 22 September 2018).

Deklarasi Pyongyang mencakup sejumlah topik, antara lain menyangkut peredaan ketegangan militer, kerja sama ekonomi dan sosial kemasyarakatan, pertukaran dan kerja sama di berbagai bidang dalam kerangka rekonsiliasi, dan denuklirisasi Semenanjung

Korea. Dalam kerangka peredaan ketegangan militer, khususnya di daerah-daerah konfrontasi seperti Zona Demiliterisasi (*Demilitarized Zone/DMZ*), kedua pihak sepakat memperkuat komunikasi untuk memperluas penghentian permusuhan dan untuk mencegah bentrokan militer yang tidak disengaja dengan segera mengaktifkan Komite Militer Gabungan Antar-Korea. Kesepakatan terkait peredaan ketegangan militer di perbatasan ini dipandang perlu oleh kedua pihak, karena ketegangan yang terjadi selama ini seringkali bermula dari aksi-aksi provokatif militer di wilayah perbatasan.

Dalam kerangka kerja sama ekonomi dan sosial kemasyarakatan, kedua pihak sepakat membangun jalur kereta api di sisi timur dan pantai barat, dan menghidupkan kembali Kawasan Industri Kaesong (KIK) yang berada di wilayah Korea Utara dan tidak jauh dari perbatasan, untuk dikembangkan bersama bagi kepentingan ekonomi kedua negara. Rencananya kedua negara akan mendirikan kantor penghubung di KIK dan mulai mengoperasikan industri secepat mungkin.

Kedua pihak juga sepakat untuk secara aktif mempromosikan kerja sama lingkungan selatan-utara, dan memperkuat kerja sama dalam bidang pencegahan epidemi, kesehatan masyarakat dan perawatan medis, termasuk tindakan untuk mencegah masuknya dan penyebaran penyakit menular. Terlihat di sini bahwa kerja sama ekonomi dan kesejahteraan masyarakat juga penting diperhatikan oleh kedua Korea ketika mereka ingin berdamai secara sungguh-sungguh.

Pertemuan Pyongyang juga menyepakati pertukaran dan kerja sama di berbagai bidang dalam kerangka rekonsiliasi, yang

dimaksudkan untuk menunjukkan semangat bangsa Korea, baik secara internal maupun eksternal. Dalam konteks ini, kedua pihak sepakat mempromosikan pertukaran budaya dan seni, dan untuk pertama kalinya pada bulan Oktober ini kegiatan tersebut sudah dilakukan melalui pertunjukan Kelompok Seni Pyongyang di Seoul. Kedua pihak juga sepakat untuk berpartisipasi bersama-sama dalam Olimpiade Musim Panas 2020 di Tokyo dan pertandingan internasional lainnya, dan bekerja sama dalam penawaran untuk penyelenggaraan bersama Olimpiade Musim Panas 2032.

Hasil pertemuan Pyongyang lainnya yang signifikan adalah denuklirisasi Semenanjung Korea. Terkait hal ini, kedua belah pihak telah berbagi pandangan bahwa Semenanjung Korea harus berubah menjadi tanah damai (*land of peace*) yang bebas dari senjata nuklir dan ancaman nuklir, dan kemajuan substansial menuju tujuan ini harus dilakukan dengan cepat. Dalam konteks ini, Korea Utara telah bersedia untuk membongkar secara permanen tempat uji coba rudal Dongchang-ri dan siap bekerja sama dengan para ahli dari negara-negara yang relevan.

Dalam kerangka denuklirisasi ini juga, Korea Utara menyatakan kesediaannya untuk terus mengambil langkah-langkah tambahan, seperti pembongkaran permanen fasilitas nuklir di Yeongbyeon, dan bekerja sama erat dengan Korea Selatan dalam proses menuju denuklirisasi Semenanjung Korea. Pemimpin Korea Utara, Kim Jong-Un, juga mengemukakan bahwa ia mengizinkan para pengawas internasional untuk mengamati langsung pembongkaran fasilitas-fasilitas nuklir penting yang dimiliki negaranya.

## **Momentum Perdamaian Perlu Dijaga**

Memperhatikan hasil pertemuan Pyongyang tersebut di atas, masyarakat internasional tentu berharap bahwa kesepakatan-kesepakatan yang dicapai tersebut dapat diimplementasikan, sehingga mengurangi keraguan akan terwujudnya perdamaian di Semenanjung Korea. Dalam isu denuklirisasi, misalnya, Korea Utara harus memperlihatkan bahwa hal tersebut akan dilaksanakan secara sungguh-sungguh, dan hal itu dilakukan tidak saja untuk menjawab laporan IAEA (yang pernah menyebutkan bahwa Korea Utara memiliki program pengembangan senjata nuklir), tetapi memang dilakukan oleh Korea Utara dalam kerangka menuju kesepakatan perdamaian secara permanen dengan Korea Selatan. Sebagaimana diketahui, Korea Utara dan Korea Selatan secara resmi masih dalam status perang, sebab Perang Korea 1950-1953 hanya diakhiri dengan perjanjian gencatan senjata.

Harapan akan terwujudnya perdamaian secara permanen di Semenanjung Korea juga dikemukakan oleh Sekretaris Jenderal PBB, Antonio Guterres, yang menyambut positif hasil pertemuan Pyongyang, dan berharap akan ditindaklanjuti oleh Korea Utara dan Korea Selatan. Pada tahap awal, tindak lanjut tersebut sudah mulai dilakukan oleh kedua Korea, ketika pada 1 Oktober 2018 (hingga 20 hari ke depan) pasukan dari Korea Utara dan Korea Selatan mulai menyingkirkan ranjau-ranjau darat di sepanjang perbatasan kedua negara. Langkah ini merupakan bagian dari upaya peredaan ketegangan dan pembangunan kepercayaan yang disepakati oleh pemimpin kedua Korea di Pyongyang. Lebih dari 800 ribu ranjau darat diyakini telah dipasang

di sepanjang perbatasan dua Korea selama dan setelah perang 1950-1953. Presiden Korea Selatan, Moon Jae-in, berharap agar aksi pembersihan ranjau ini menjadi pendorong bagi upaya denuklirisasi Semenanjung Korea.

Denuklirisasi Semenanjung Korea sejauh ini memang menjadi isu krusial dalam hubungan Korea Utara dan Korea Selatan. Demikian juga dalam hubungan Korea Utara dan AS, sehingga turut mempengaruhi proses perdamaian di kawasan ini. Namun, terlepas dari peliknya persoalan denuklirisasi tersebut, masyarakat internasional, bahkan masyarakat Korea sendiri (khususnya di Korea Selatan), sangat berharap momentum perdamaian perlu dijaga dan ditindaklanjuti dengan langkah-langkah yang lebih konkret untuk menuju perdamaian permanen. Duta Besar Korea Selatan untuk Indonesia, Kim Chang-beom, mengatakan bahwa secara umum masyarakat di Korea mendukung perkembangan baru ini, dan menurut survei lebih dari 70 persen mendukung hasil pertemuan Pyongyang (*okezone.com*, 21 September 2018).

AS, yang selama ini selalu mengkritisi Korea Utara, juga menyambut positif hasil pertemuan Pyongyang, dan berharap momentum perdamaian ini dapat dijaga dengan baik, termasuk melalui negosiasi konstruktif antara AS dan Korea Utara. Ini artinya, negosiasi antara Korea Utara dan AS yang sekian lama terjebak dalam suasana kebuntuan diharapkan secara resmi dapat dibuka kembali pasca-pertemuan Pyongyang. Negosiasi antara Korea Utara dan AS tampaknya akan kembali terlaksana, terutama setelah Menteri Luar Negeri AS, Mike Pompeo, berkunjung ke Pyongyang pada 8 Oktober 2018 dan melakukan

pertemuan dengan Kim Jong-Un. Dalam pertemuan tersebut, Kim dan Pompeo sepakat akan kembali mewujudkan pertemuan antara Kim dan Presiden AS Donald Trump secepatnya.

Kunjungan Pompeo yang keempat kalinya ke Korea Utara ini tampaknya lebih baik daripada sebelumnya. Pada kunjungan sebelumnya (Juli 2018), rezim Korea Utara menilai Pompeo terlalu memaksakan kehendak kepada Korea Utara, yang menegaskan keinginan AS agar Korea Utara harus terlebih dahulu melakukan denuklirisasi sebelum dilakukan pencabutan sanksi. Pendekatan keras AS terhadap Korea Utara tampaknya harus diubah sejalan dengan perkembangan hubungan Korea Selatan dan Korea Utara yang semakin membaik. AS harus mempertimbangkan pilihan lain dalam menangani Korea Utara dan tidak hanya fokus pada memberi sanksi tegas. Apalagi saat ini, China, Rusia, dan Korea Selatan gencar meminta agar sanksi internasional terhadap Korea Utara dilonggarkan atau dicabut.

Pasca-pertemuan Pyongyang, dan dalam kerangka menjaga momentum perdamaian, Korea Selatan telah mempertimbangkan untuk mengurangi sebagian sanksinya kepada Korea Utara. Hal ini diharapkan bisa memacu peningkatan diplomasi dan menurunkan ketegangan akibat krisis nuklir di Semenanjung Korea. Sanksi yang sedang dikaji untuk dikurangi adalah yang dikenakan setelah serangan terhadap kapal perang Korea Selatan pada 2010. Korea Selatan pada saat itu menyimpulkan bahwa insiden yang menewaskan 45 pelautnya itu dilakukan oleh Korea Utara. Salah satu sanksi Korea Selatan yaitu melarang

Korea Utara menggunakan jalur pelayaran di perairan Korea Selatan, antara lain Selat Jeju. Pencabutan sanksi ini akan memberi manfaat bagi Korea Utara, karena kapal-kapalnya akan kembali melewati Selat Jeju dan hal itu akan menghemat waktu dan biaya.

Momentum perdamaian di Semenanjung Korea memang harus dijaga dengan baik, terutama melalui pendekatan diplomasi. Jika memperhatikan perkembangan yang terjadi akhir-akhir ini di Semenanjung Korea, rezim Korea Utara yang selama ini tertutup dan kaku, tampaknya sudah mulai mau berkompromi untuk membicarakan perdamaian. Bahkan mereka sudah bersedia mengambil langkah-langkah ke arah perlucutan nuklir. Dalam situasi seperti ini, masyarakat internasional, terutama negara-negara di kawasan, harus melihatnya sebagai momentum perdamaian yang perlu dijaga. Indonesia, meskipun tidak mengambil peran besar dalam proses perdamaian di Semenanjung Korea, harus turut menjaga momentum ini melalui forum-forum multilateral, baik di tingkat kawasan maupun global (baik forum antar-pemerintah maupun antar-parlemen). Indonesia, bersama masyarakat internasional lainnya, harus turut mengawal agar proses perdamaian di Semenanjung Korea ini terus bergerak maju dan segera terwujud.

### **Penutup**

Perkembangan situasi di Semenanjung Korea yang semakin kondusif, yang antara lain ditandai dengan pertemuan antara Presiden Korea Selatan Moon Jae-in dan Pemimpin Korea Utara Kim Jong-un di Pyongyang September 2018, telah membuka dan memperkuat ruang

dialog dan kerja sama antar-kedua Korea untuk mewujudkan perdamaian di Semenanjung Korea. Perkembangan ini tentu menjadi bagian yang sangat penting dalam upaya mewujudkan perdamaian di Semenanjung Korea. Langkah selanjutnya adalah, kedua Korea harus secara konsisten mengimplementasikan kesepakatan-kesepakatan dalam kerangka damai di antara mereka. Pendekatan dialog dan diplomasi harus dikedepankan, termasuk dalam hubungan antara AS dan Korea Utara, sehingga momentum perdamaian tetap terjaga dan upaya perdamaian di Semenanjung Korea dapat diwujudkan. Dalam kerangka itu pula, negara-negara di kawasan, termasuk Indonesia, harus turut mengawal upaya perdamaian ini.

### **Referensi**

- "Dubes Korsel: Sebagian Besar Rakyat Korea Sambut Baik Hasil KTT di Pyongyang", <https://news.okezone.com/read/2018/09/21/18/1953816/dubes-korsel-sebagian-besar-rakyat-korea-sambut-baik-hasil-ktt-di-pyongyang>, diakses 2 Oktober 2018.
- "Hasil Pertemuan Korea Utara & Korea Selatan: Sepakati Era Tanpa Perang", <https://www.idntimes.com/news/world/emajewe/hasil-pertemuan-korea-utara-dan-korea-selatan-c1c2/full>, diakses 2 Oktober 2018.
- "Kim's 'openness' crucial for Pyongyang meet", *The Jakarta Post*, 22 September 2018, hal. 9.
- "Korea Selatan-Korea Utara Mulai Bersihkan Ranjau di Perbatasan", <https://dunia.tempo.co/read/1131802/korea-selatan-korea-utara-mulai-bersihkan-ranjau-di-perbatasan>, diakses 3 Oktober 2018.
- "Korea Utara Sepakat Tutup Lokasi Uji Coba Nuklir", <https://www.bbc.com/indonesia/dunia-45570066>, diakses 3 Oktober 2018.

- "Korsel Pertimbangkan Pengurangan Sanksi", *Kompas*, 11 Oktober 2018, hal. 8.
- "Pertemuan Tingkat Tinggi Korea Utara-Korea Selatan", *Kompas*, 19 September 2018, hal. 8.
- "Semenanjung Korea: Korsel dan Korut Bersihkan Ranjau", *Kompas*, 2 Oktober 2018, hal. 8.
- "Sekjen PBB Apresiasi Pertemuan Dua Korea", <https://www.republika.co.id/berita/internasional/asia/18/09/20/pfcccg370-sekjen-pbb-apresiasi-pertemuan-dua-korea>, diakses 3 Oktober 2018.
- "Titik Terang Perlucutan Nuklir", *Kompas*, 9 Oktober 2018, hal. 8.



Sita Hidriyah  
[sita.hidriyah@dpr.go.id](mailto:sita.hidriyah@dpr.go.id)

Sita Hidriyah, S.Pd.,M.Si., menyelesaikan pendidikan S1 Keguruan Ilmu Pendidikan Bahasa Inggris dari Universitas Atmajaya Jakarta pada tahun 2005 dan pendidikan S2 Hubungan Internasional dari FISIP Universitas Indonesia pada tahun 2008. Saat ini menjabat sebagai Peneliti Muda bidang Hubungan Internasional pada Pusat Penelitian, Badan Keahlian DPR RI. Beberapa karya tulis ilmiah yang telah dipublikasikan melalui jurnal dan buku antara lain: "Upaya Pemerintah dan Kerjasama Luar Negeri Dalam Pengentasan Kemiskinan Menuju Pembangunan Berkelanjutan" (2013), "Pengungsi Suriah dan Respons Internasional dan Asian Parliamentary Assembly (APA)" (2016), dan "Tantangan Kerjasama Indonesia dan Jepang Dalam Diplomasi Ekonomi " (2016).

#### **Info Singkat**

© 2009, Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI  
<http://puslit.dpr.go.id>  
ISSN 2088-2351

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang. Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi tulisan ini tanpa izin penerbit.